

2018

INDEKS

PEMBANGUNAN

MANUSIA

(IPM)

Kabupaten Luwu Timur



2018

INDEKS

PEMBANGUNAN

MANUSIA

(IPM)

Kabupaten Luwu Timur



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR 2018

ISBN	: -
Katalog BPS	: 4102002.7325
Nomor Publikasi	: 73250.1916
Ukuran Buku	: 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman	: vii + 50 halaman
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur
Gambar Kulit	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga publikasi yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018” dapat diselesaikan dengan baik.

Hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Peran para pelaku pembangunan kemudian adalah bagaimana menterjemahkan hakikat tersebut dan menjabarkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tentu saja, instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia itu telah berjalan juga menjadi faktor penting didalamnya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk menyusun Analisis Indeks Pembangunan Manusia sebagai sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan terkait pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur secara berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya publikasi ini diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyusunan publikasi ini. Akhirnya kami berharap, kritik dan saran guna perbaikan publikasi dimasa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data.

Malili, November 2019
**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**
Kepala,

Drs. Abdul Halim, M.Si
196112311983021008

Daftar Isi

1

BAB I PENDAHULUAN

- 1 LATAR BELAKANG
- 3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 4 MANFAAT DAN KEGUNAAN
- 5 FUNGSI, LINGKUP DAN KETERBATASAN

29

BAB III GAMBARAN UMUM SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

- 29 POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR
- 31 STATUS IPM KABUPATEN LUWU TIMUR
- 33 PERTUMBUHAN IPM KABUPATEN LUWU TIMUR

38

BAB V CAPAIAN DAN TANTANGAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

- 38 CAPAIAN DAN TANTANGAN BIDANG PENDIDIKAN
- 41 CAPAIAN DAN TANTANGAN BIDANG KESEHATAN
- 42 CAPAIAN DAN TANTANGAN BIDANG EKONOMI

7

BAB II METODOLOGI PENGHITUNGAN

- 7 PERKEMBANGAN METODOLOGI IPM
- 7 SUMBER DATA
- 8 PERUBAHAN METODOLOGI IPM TAHUN 2014
- 10 KOMPONEN IPM
- 14 TEKNIK PENGHITUNGAN
- 24 KONSEP DAN DEFINISI DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KECEPATAN PERUBAHAN IPM (SHORTFALL)
- 26 KLASIFIKASI/TINGKATAN STATUS IPM
- 27 KONSEP/ISTILAH DAN DEFINISI

35

BAB IV KEMAJUAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- 35 DIMENSI KESEHATAN
- 36 DIMENSI PENDIDIKAN
- 37 STANDAR HIDUP LAYAK

44

LAMPIRAN

Daftar Tabel

- 13 | Tabel 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembentuk IPM
- 13 | Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Yang Digunakan Dalam Penghitungan
- 18 | Tabel 2.3 Konversi Lama Sekolah
- 18 | Tabel 2.4 Konversi Lama Sekolah berdasarkan Ijazah Terakhir untuk Menghitung RLS
- 23 | Tabel 2.5 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Kemampuan Daya Beli (PPP)
- 30 | Tabel 3.1 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten/Kota Seluruh Luwu Raya, 2018
- 32 | Tabel 3.2 IPM Kabupaten Luwu Timur menurut Komponen, 2017-2018

Daftar Gambar

- 29 Gambar 3.1 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Luwu Timur
- 33 Gambar 3.2 Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018
- 35 Gambar 4.1 Tren dan Pertumbuhan AHH Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018
- 36 Gambar 4.2 Tren Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018
- 37 Gambar 4.3 Tren dan Pertumbuhan Pengeluaran per kapita (PPP) di Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018
- 38 Gambar 5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Luwu Timur, 2016-2018 (Persen)
- 40 Gambar 5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Luwu Timur, 2016-2018 (persen)
- 43 Gambar 5.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2013-2018
- 43 Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan (Persen), 2014-2018

Daftar Lampiran

- 45 | Lampiran 1. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Tahun)
- 46 | Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Tahun)
- 47 | Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Tahun)
- 48 | Lampiran 4. Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Ribu Rupiah)
- 49 | Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Pada tahun 1991, Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan” (*World Development Report*). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap sikap masyarakat dan institusi institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kosep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Namun, persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan aspek pembangunan yang lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai pembangunan manusia secara keseluruhan?

Persoalan mengenai capaian pembangunan manusia dewasa ini telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Cakupan pembangunan manusia yang sangat luas dimaksud menjadikan Berbicara mengenai pilihan-pilihan manusia adalah sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun diantara sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu; pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang; pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan pilihan untuk mencapai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat

memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*). Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupannya serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 disusun dalam kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan, dengan bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga diharapkan daerah mempunyai indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Selain itu publikasi ini untuk mengukur kualitas manusia serta memberikan gambaran umum kinerja pembangunan Kabupaten Luwu Timur selama periode 2014-2018. IPM juga menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya

1.3 MANFAAT DAN KEGUNAAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dilihat perkembangan kesejahteraan penduduk di wilayah dari tahun ke tahun dan keterbandingan dengan wilayah lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena menggambarkan kualitas penduduk berupa hidup sehat dan berumur panjang, intelektualitas berupa kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dan standar hidup layak.

Secara umum manfaat data Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

- Ukuran kinerja daerah (evaluasi proses pembangunan SDM)
- Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
- Mengetahui perkembangan hasil pembangunan SDM dalam berbagai aspek kehidupan
- Mengetahui capaian program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Mendapatkan “feedback” atas kurang-berhasilan pembangunan
- Sebagai variabel pendukung penyusunan DAU

- Mengukur keterkaitan dengan proses pembangunan dibidang lainnya (ekonomi, sosial, politik dan sebagainya).

1.4 FUNGSI, LINGKUP DAN KETERBATASAN

Sejak diterbitkannya HDI oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu betul-betul diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Oleh karena itu kehadiran Laporan Indeks Pembangunan Manusia menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di daerah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasikan oleh UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM untuk mengukur indikator kualitas manusia.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu dimulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam laporan ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan publikasi ini.

Untuk mengukur ketiga dimensi pembangunan yang disebutkan di atas dibentuk suatu ukuran berupa indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan berdasar pada 3 indikator yaitu :

- a. Angka Harapan Hidup yang mengukur hidup sehat dan umur panjang,
- b. Pendidikan yang terdiri dari ; Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, yang mengukur tingkat pengetahuan, dan
- c. *Purchasing Power Parity* (PPP) yang merupakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

BAB II METODOLOGI PENGHITUNGAN

2.1 PERKEMBANGAN METODOLOGI IPM

IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990. Komponen IPM yang digunakan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan PDB per kapita. Pada tahun 1991 terjadi penyempurnaan komponen IPM yang digunakan, yaitu AHH, AMH, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PDB per kapita. Pada tahun 1995 terjadi penyempurnaan kembali terhadap komponen yang digunakan, yaitu AHH, AMH, kombinasi APK, dan PBD per kapita. Pada tahun 2010 UNDP melakukan perubahan terhadap metodologi yang digunakan yaitu AHH, RLS, HLS dan PNB per Kapita serta penghitungan agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik. Kemudian pada tahun 2011 dan 2014 penyempurnaan metodologi yaitu mengganti tahun dasar PNB dari 2005 menjadi 2011 serta merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik

2.2 SUMBER DATA

Data yang digunakan untuk keperluan penyusunan IPM Kabupaten Luwu Timur sebagian besar menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) semesteran untuk mengumpulkan data kependudukan meliputi bidang pendidikan, kesehatan,

perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya yang terdapat dalam kuesioner Kor dan Modul

2.3 PERUBAHAN METODOLOGI IPM TAHUN 2014

Pada tahun 2014 terjadi perubahan indikator dan metode penghitungan IPM, yaitu:

1. Angka Melek huruf pada metode lama diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
2. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung Paritas Daya Beli. Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan paritas daya beli.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diantaranya:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. **Angka Melek Huruf (AMH)** sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

2. **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus **rata-rata aritmatik** dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Keunggulan IPM metode baru:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan **Rata-rata Lama Sekolah** dan angka **Harapan Lama Sekolah**, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. **PNB** menggantikan **PDB** karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan **rata-rata geometrik** dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dampak perubahan IPM metode baru diantaranya:

1. Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama.
2. Terjadi perubahan peringkat IPM. Peringkat tidak bisa diperbandingkan akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi.

2.4 KOMPONEN IPM

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran umur panjang dan sehat digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir; dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; sedangkan dimensi hidup layak digunakan indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

2.4.1 ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penghitungan AHH, yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West* yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Penggunaan angka harapan hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan *resultante* dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

Penggunaan batas maksimum angka tertinggi yang digunakan untuk penghitungan indeks yaitu 85 tahun dan terendah 20 tahun. Angka tersebut diambil dari standar UNDP dan BPS.

2.4.2 PENGETAHUAN

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak

tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam penghitungan indeks pendidikan, batasan nilai minimum dan maksimum juga digunakan sesuai standar UNDP dan BPS. Batas maksimum untuk HLS adalah 18 tahun sedangkan batas minimumnya adalah 0 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah menggunakan batas maksimum 15 tahun dan batas minimumnya 0 tahun. Batas maksimum tersebut mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

2.4.3 HIDUP LAYAK

Dimensi ketiga untuk mengukur kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan yang lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. Untuk menghitung paritas daya beli, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita yang

disesuaikan. Nilai maksimum yang dipakai BPS adalah sebesar Rp 26.572.353 dan nilai minimum sebesar Rp 1.007.436.

Tabel 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembentuk IPM

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi	IPM
Umur panjang dan sehat	Angka harapan hidup pada saat lahir (e_0)	Indeks harapan hidup \rightarrow Indeks X1	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Indeks pendidikan \rightarrow Indeks X2	
Kehidupan yang layak	Pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (PPP Rupiah)	Indeks pendapatan \rightarrow Indeks X3	

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Yang Digunakan Dalam Penghitungan

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (Rp)

Sumber: Indonesia Human Development Report 2001 – Towards a New Consensus (Democracy and Human Development in Indonesia) – BPS, BAPPENAS, UNDP

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan usia harapan hidup (*life expectancy at Age 0; e₀*), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu Harapan lama sekolah (*Expectancy Years School/ EYS*) dan rata- rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/ MYS*) dan indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh paritas daya beli (*purchasing power parity; PPP*). Berhubung data PPP sulit diperoleh, maka terkadang sering digunakan PDRB riil per kapita

2.5 TEKNIK PENGHITUNGAN

2.5.1 ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) atau Life Expectancy (*e₀*) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Dasar penghitungan AHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) dengan pola model West Coale-demeny Trussell equations dan proyeksi IMR.

Adapun rumus dalam menghitung tren tingkat mortalitas sebagai berikut:

$$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$$

Keterangan:

Y= Perkiraan IMR

L= Konstanta asymtot bawah IMR

U= Konstanta asymtot atas IMR

a,b= Koefisien kurva logistik

t= Waktu sebagai variabel bebas

e= Konstanta eksponensial

Rumus indeks kesehatan dapat disajikan sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = \frac{AHH-20}{85-20} \times 100$$

Keterangan:

e_0 = Angka harapan hidup

20 = Angka minimum harapan hidup (UNDP)

85 = Angka maksimum harapan hidup (UNDP)

2.5.2 HARAPAN LAMA SEKOLAH

Langkah pertama yaitu menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas); langkah kedua menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas); langkah ketiga menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas), langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur; langkah keempat menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

Formula yang digunakan yaitu:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a dan tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

FK = Faktor koreksi pesantren

Faktor koreksi untuk siswa yang sekolah di pesantren dihitung dari data siswa yang bersekolah di pesantren yang diperoleh

dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi tersebut dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah Bermukim}}{\text{Jumlah Santri Seluruhnya}}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim} \\ = \text{Rasio santri mukim} \times \text{Jumlah santri sekolah} \end{aligned}$$

$$\text{Faktor koreksi (FK)} = \frac{\text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 7 Tahun ke Atas}} + 1$$

2.5.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Secara rinci penghitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Terdapat empat kombinasi variabel pembentuk indikator rata-rata lama sekolah diantaranya, Angka Partisipasi Sekolah; jenjang pendidikan yang pernah diduduki; kelas yang sedang dijalani; dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Langkah pertama adalah menyeleksi penduudk usia 25 tahun ke atas; langkah kedua yaitu menghitung lamanya sekolah, jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah sekolah, maka lama sekolah = 0, jika partisipasi sekolah yaitu masih sekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut:

Tabel 2.3 Konversi Lama Sekolah

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2=6 dan kuliah S3=7 yang gtidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terkahir + kelas terakhir -1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang terakhir	Konversi ijazah terakhir

Tabel 2.4 Konversi Lama Sekolah berdasarkan Ijazah Terakhir untuk Menghitung RLS

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2/S3	18

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Langkah ketiga yaitu menghitung rata-rata lama sekolah dengan rumus:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS= Rata-rata lama sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk_i= lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah

n= jumlah penduduk (i=1,2,3,...,n)

Rumus indeks pengetahuan dapat disajikan sebagai berikut:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Yang terdiri dari:

1. Indeks Harapan Lama Sekolah:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

2. Indeks Rata-rata Lama Sekolah:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

2.5.4 PURCHASING POWER PARITY (PPP)

Kemampuan Daya Beli (PPP) memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Paritas daya beli dihitung sebagai perbandingan rata-rata geometrik harga paket komoditas barang dan jasa di suatu wilayah terhadap Jakarta Selatan.

Langkah pertama untuk menghitung kemampuan daya beli (PPP) yaitu dengan menghitung rata-rata pengeluaran per kapita; langkah kedua yaitu menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil); langkah ketiga yaitu menghitung Paritas Daya Beli; langkah keempat yaitu menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan.

Penghitungan rata-rata pengeluaran perkapita dilakukan dengan 3 tahap, yaitu menghitung pengeluaran per kapita (anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap kabupaten; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (Y'_t)= rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12 / 1000.

Menghitung nilai rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan:

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = Indeks Harga Konsumen tahun t dengan tahun dasar 2012

Menghitung paritas daya beli dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:

- Tahap pertama menghitung harga rata-rata komoditas terpilih dengan rumus:

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

V_i = Total value biaya yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK, yaitu:

- Perlengkapan mandi → pasta gigi, sabun mandi, shampo, sikat gigi
- Barang habis pakai rumah tangga → bola lampu, lampu TL/neon, korek api gas, obat nyamuk bakar, pembasmi nyamuk cair, pembasmi nyamuk spray, pembersih lantai.
- Sabun cuci → sabun cuci piring, sabun cream detergent
- Barang kecantikan → bedak, deodorant, body lotion, lipstik, minyak rambut, minyak parfum, pelembab muka, pembersih dan penyegar.
- Perawatan kulit, kuku, muka, rambut → tarif creambath, potong rambut pria, potong rambut wanita, potong rambut anak.
- Biaya kesehatan → biaya dokter umum
- SPP → SD

- Transportasi → angkutan dalam kota
- Alas kaki → sandal kulit pria
- Meubelair → meja kursi tamu
- Peralatan rumah tangga → lemari es
- Perlengkapan perabot rumah tangga → spreng
- Alat dapur/makan → kompor

➤ Tahap kedua yaitu menghitung paritas daya beli dengan rumus:

$$Paritas\ Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

p_{ij} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} = harga komoditas i di kab/kota j

m = jumlah komoditas

Tabel 2.5 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Kemampuan Daya Beli (PPP)

Kelompok	Share Kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah item
(1)	(2)	(3)	(4)
MAKANAN	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	3,95	2,3	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan Susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan Lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,4	3
Konsumsi lainnya	1	0,61	1
Makanan dan Minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
NON MAKANAN	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barnag dan jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0	0
Keperluan pesta, upacara/kenduri	1,78	0	0
TOTAL	100	73,63	96

- Tahap ketiga menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan:

Y_t^{**} = rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Rumus Indeks Pendapatan adalah sebagai berikut:

$$I_{\text{pendapatan}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

2.6 KONSEP DAN DEFINISI DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KECEPATAN PERUBAHAN IPM (*SHORTFALL*)

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Angka indeks pembangunan manusia bernilai kisaran antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM yang dicapai suatu daerah hampir tidak mungkin bernilai 100. Jarak relatif antara nilai ideal IPM (yaitu 100) dengan nilai IPM yang telah dicapai oleh suatu daerah pada suatu periode itulah yang dinamakan Shortfall.

Angka *shortfall* dapat dipengaruhi sebagai indikator perkembangan (kecepatan perubahan) pembangunan manusia di suatu daerah. Dengan demikian, tantangan bagi masing-masing daerah adalah bagaimana cara memaksimalkan nilai shortfall mereka (mendekatkan nilai IPM yang diperoleh sedekat-dekatnya dengan nilai IPM ideal). Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimum (100), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM ($=R$; dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R = \left(\left[\frac{IPM_{(t_1)} - IPM_{(t_0)}}{IPM_{(ref)} - IPM_{(t_0)}} \right] \times 100 \right)^{1/n}$$

Keterangan:

R = Reduksi shortfall per tahun;

$IPM_{(t_0)}$ = IPM tahun awal;

$IPM_{(t_1)}$ = IPM tahun terakhir; dan

$IPM_{(ref)}$ = IPM acuan ideal yang dalam hal ini sama dengan 100

2.7 KLASIFIKASI/TINGKATAN STATUS IPM

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu (a) **Rendah** apabila IPM kurang dari 60, (b) **Sedang atau menengah** apabila IPM antara 60-70, (c) **Tinggi** apabila IPM antara 70-80 dan (d) **sangat tinggi** apabila IPM lebih dari 80 ke atas. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Sangat Tinggi	• $IPM \geq 80$
Tinggi	• $70 \leq IPM < 80$
Sedang	• $60 \leq IPM < 70$
Rendah	• $IPM < 60$

2.8 KONSEP/ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk memudahkan para pengguna data memahami beberapa konsep/istilah yang mungkin masih belum/kurang terbiasa, berikut ini diuraikan beberapa konsep/istilah dan definisi dengan harapan agar para pengguna/konsumen data menjadi lebih mudah untuk memahami publikasi ini.

- A. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir (e_0) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk yang lahir pada tahun tersebut dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan status kesehatan penduduk atau keadaan sosial ekonomi penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Interpretasi, semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin berhasil pembangunan dibidang sosial ekonomi suatu daerah terutama dibidang kesehatan.
- B. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

- C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sedang/pernah dialami.
- D. Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP), PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di satu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.
- E. Indeks Kesehatan, adalah salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Nilai indeks ini diperoleh dari penghitungan yang melibatkan angka harapan hidup.
- F. Indeks Pendidikan, merupakan indeks yang didasarkan pada kombinasi antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- G. Indeks Pengeluaran, merupakan indeks yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) yang disesuaikan dengan rumus Atkinson.

BAB III

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

3.1 POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 sebesar 72,16, menempati peringkat 4, memiliki peringkat yang sama dari tahun sebelumnya, dengan nilai IPM pada tahun 2017 adalah sebesar 71,46. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2015 sudah berstatus tinggi.

Selama periode 2014-2018 angka IPM Kabupaten Luwu Timur selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, IPM Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan.



Gambar 3.1 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Luwu Timur

Untuk jajaran kabupaten/kota di wilayah luwu raya, IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 berada pada posisi kedua setelah Kota Palopo. Sejak periode 2010 hingga 2018 capaian IPM tertinggi di wilayah luwu raya dicapai oleh Kota Palopo. Pada tahun 2018 IPM Kota Palopo mencapai 77,30, kemudian pada posisi kedua adalah Kabupaten Luwu Timur dengan capaian sebesar 72,16 dan posisi ketiga di wilayah luwu raya adalah Kabupaten Luwu dengan capaian IPM sebesar 69,60.

Tabel 3.1 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten/Kota Se-Luwu Raya, 2018

Kabupaten/ Kota	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	IPM
Luwu	69,84	13,3	7,97	9.705	69,60
Tana Toraja	72,8	13,5	7,94	7.087	67,66
Luwu Utara	67,9	12,39	7,53	11.429	68,79
Luwu Timur	70,03	12,81	8,45	12.346	72,16
Toraja Utara	73,09	13,35	7,76	7.783	68,49
Kota Palopo	70,49	15,06	10,51	12.662	77,30
SULAWESI SELATAN	70,08	13,34	8,02	10.814	70,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Pada tahun 2018 kabupaten/kota di wilayah luwu raya hanya terdapat dua kabupaten/kota yang mencapai status pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur. Sementara Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara dan Toraja Utara masih mencapai status pembangunan manusia “sedang”. Selisih capaian IPM Kota Palopo dengan IPM Luwu Timur sebesar 5,14 poin. Perbedaan

capaian IPM disebabkan oleh perbedaan capaian komponennya.

Berdasarkan Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 0,46 tahun dibandingkan Kota Palopo. Jika di Kabupaten Luwu Timur, bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 70,03 tahun, di Kota Palopo bayi baru lahir memiliki harapan hidup lebih panjang, yaitu 70,49 tahun. Untuk bidang pendidikan, Kabupaten Luwu Timur memiliki level yang berbeda dengan Kota Palopo. Penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan SMA (12,81 tahun untuk Luwu Timur dan 15,06 tahun untuk Kota Palopo). Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, maka selisih rata-rata lama sekolah antara Kota Palopo dengan Luwu Timur yaitu 2,06 tahun. Kota Palopo memiliki rata-rata lama sekolah selama 10,51 tahun, sementara di Kabupaten Luwu Timur memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,45 tahun. Untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan dengan Kota Palopo.

3.2 STATUS IPM KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 sebesar 72,16. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pada Tabel 2.7 dapat

diketahui bahwa secara keseluruhan semua komponen penyusun IPM mengalami peningkatan nilai apabila dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 3.2 IPM Kabupaten Luwu Timur menurut Komponen, 2017-2018

Komponen	2017	2018
AHH (tahun)	69,79	70,03
HLS (tahun)	12,79	12,81
RLS (tahun)	8,2	8,45
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	12.030	12.346
IPM	71,46	72,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Saat ini, usia harapan hidup lahir di Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 70,03 tahun dengan kata lain harapan hidup bayi yang baru lahir tahun 2018 dapat bertahan hidup hingga usia 70,03 tahun.

Sementara itu rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Luwu Timur usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,45 tahun mas sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,81 tahun atau setara dengan kelas XII atau tamat SMA (menempuh diploma I). Standar hidup

layak Kabupaten Luwu Timur yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai 12,346 juta per kapita per tahun.

3.3 PERTUMBUHAN IPM KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Luwu Timur. Dilihat dari trennya, IPM Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan. Dalam delapan tahun (2011-2018), terjadi kenaikan 3,22 poin.



Gambar 3.2 Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Kabupaten Luwu Timur

cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2017-2018, pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur berhasil tumbuh sebesar 0,98 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya (2016-2017) yang sebesar 0,72 persen.

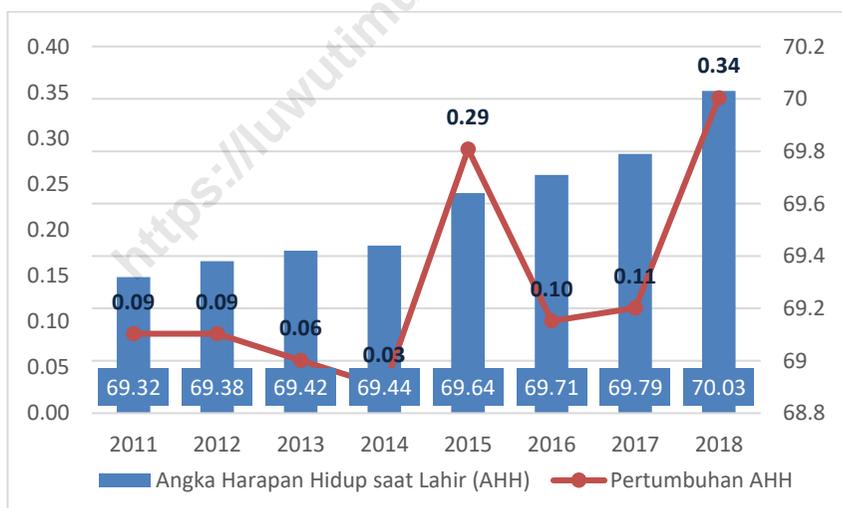
<https://luwutimurkab.bps.go.id>

BAB IV

CAPAIAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

4.1 DIMENSI KESEHATAN

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2011-2018 cenderung stabil pada kisaran 69 tahun dan meningkat setiap tahunnya.



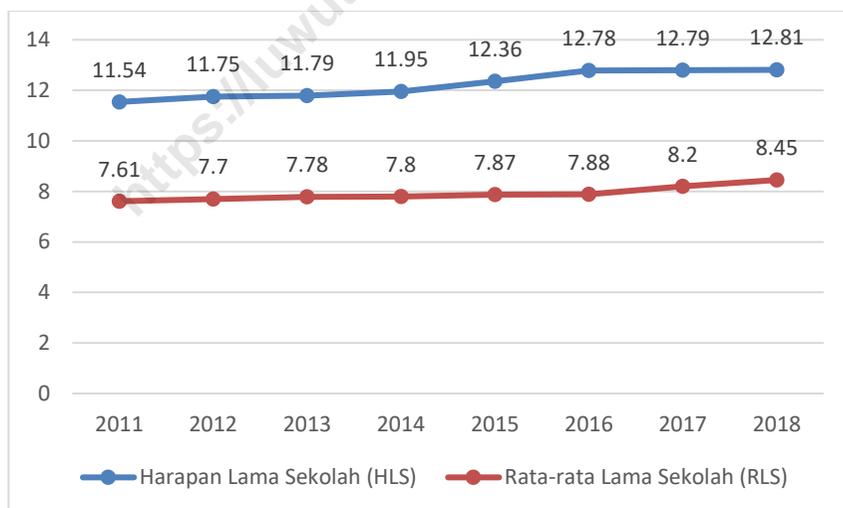
Gambar 4.1 Tren dan Pertumbuhan AHH Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018

Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang

kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya AHH di Kabupaten Luwu Timur.

4.2 DIMENSI PENDIDIKAN

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.



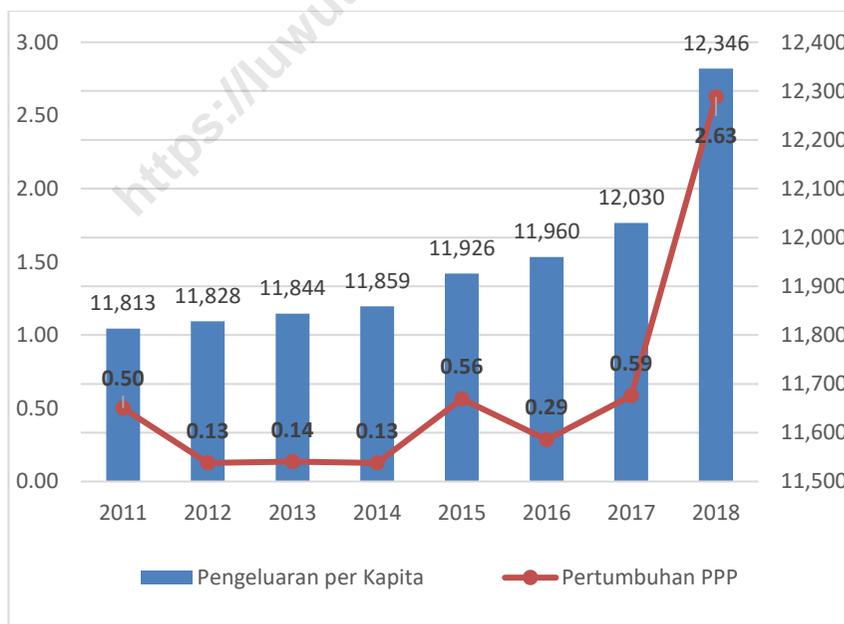
Gambar 4.2 Tren Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018

Pada periode tahun 2011-2018, tren Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan. Pada tahun 2018,

harapan lama sekolah tumbuh sebesar 0,16 persen. Sedangkan tren rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode yang sama. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 3,05 persen.

4.3 STANDAR HIDUP LAYAK

Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2011-2018 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh sebesar 2,63 persen. Jika pada tahun 2011 pengeluaran per kapita penduduk berkisar pada 11,8 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2018 telah mencapai 12,3 juta rupiah per tahun.



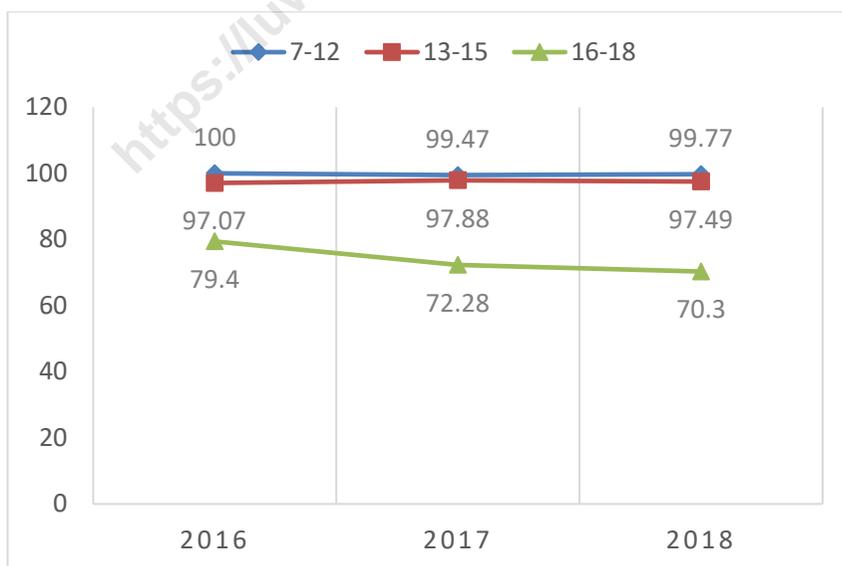
Gambar 4.3 Tren dan Pertumbuhan Pengeluaran per kapita (PPP) di Kabupaten Luwu Timur, 2011-2018

BAB V

CAPAIAN DAN TANTANGAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

5.1 CAPAIAN DAN TANTANGAN BIDANG PENDIDIKAN

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, misalnya memperlus cakupan pendidikan formal guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa program yang telah diupayakan pemerintah seperti pemberian bantuan operasional sekolah yang lebih dikenal dengan istilah dana BOS untuk menekan angka putus sekolah, memberantas buta aksara, dan jaminan kesematan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun.



Gambar 5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Luwu Timur, 2016-2018 (Persen)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut.

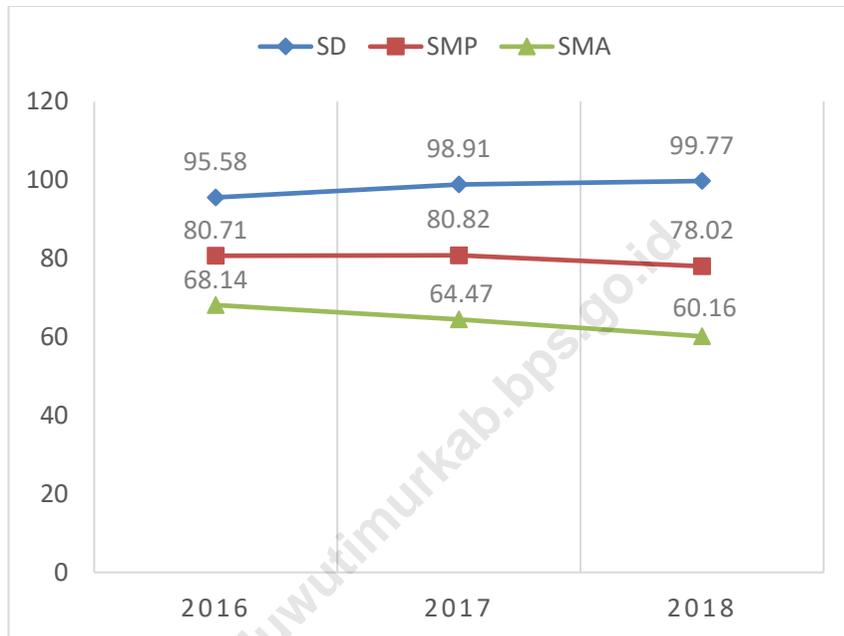
APS usia 7-12 tahun (setara SD/Sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 berdasarkan data hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mencapai 99,77 persen. Artinya tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan SD di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup tinggi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan (2017 = 99,47 persen).

APS usia 13-15 tahun (setara SMP/ sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 mencapai 97,49 persen, lebih rendah daripada usia SD/ sederajat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 13-15 tahun mengalami penurunan (2017 = 97,88 persen).

APS usia 16-18 tahun (setara SMA/ sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 mencapai 70,3 persen. Angka ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan APS usia 7-12 tahun dan APS usia 13-15 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 16-18 tahun ini juga mengalami penurunan (2017 = 72,28 persen).

Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, kita juga dapat menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang tertentu yang masih

bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.



Gambar 5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Luwu Timur, 2016-2018 (persen)

APM usia 7-12 tahun (SD/ sederajat) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2018 telah mencapai 99,77 persen. APM usia 13-15 (SMP/ sederajat) pada tahun 2018 mencapai 78,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 22 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih harus meningkatkan program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar dirasakan oleh semua masyarakat. APM usia 16-18 tahun masih berada pada angka 60,16 persen, mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2 CAPAIAN DAN TANTANGAN BIDANG KESEHATAN

Pada tahun 2018 capaian AHH Kabupaten Luwu Timur sebesar 70,03 tahun. Meningkat 0,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Berdasarkan hasil olah Susenas tahun 2017 dan 2018 diperoleh indikator yang mendukung peningkatan capaian AHH Kabupaten Luwu Timur yaitu usia hamil pada perkawinan pertama dan penolong kelahiran/tempat melahirkan.

Tingkat kesadaran perempuan untuk menikah di usia kurang dari enam belas tahun semakin menurun yang ditandai dengan persentase perempuan umur pertama kali menikah di bawah usia enam belas tahun pada tahun 2017 sebesar 13,95 persen, naik sebesar 1,83 poin pada tahun 2018 (15,78). Namun, meskipun kecenderungan menikah usia muda meningkat, mayoritas perempuan Kabupaten Luwu Timur melakukan pernikahan pertama pada usia 21 tahun keatas (44,22 persen).

Selain itu, kesadaran perempuan untuk memilih menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan juga semakin membaik. Pada tahun 2017 persentase perempuan yang melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 80,93 persen, meningkat sebesar 8,97 poin di tahun 2018 (89,9 persen).

Sementara yang memilih tempat melahirkan di rumah pada tahun 2017 sebesar 19,07 persen, turun menjadi 10,09 persen di tahun 2018.

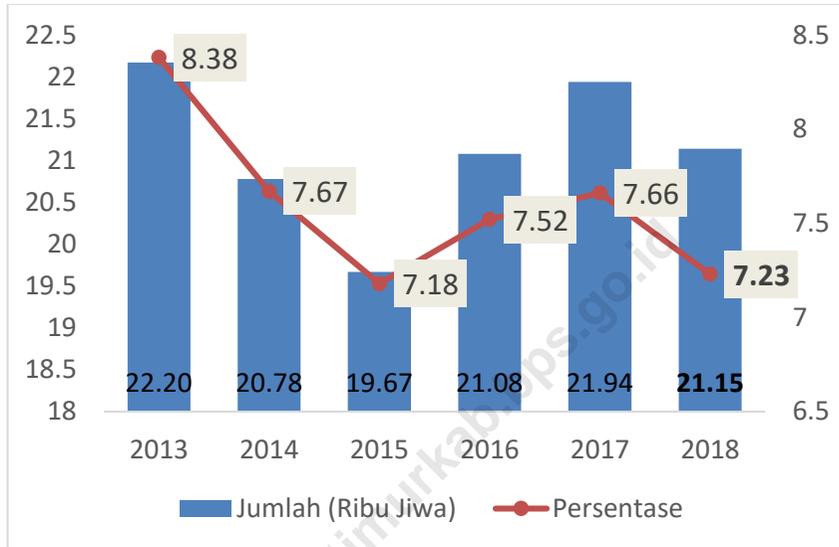
5.3 CAPAIAN DAN TANTANGAN BIDANG EKONOMI

Data kemiskinan diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dimana pelaksanaannya dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Berdasarkan hasil olah Susenas 2014-2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi baik dari jumlah maupun persentase. Dalam periode yang sama, secara kumulatif dari tahun 2013 hingga 2018, penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 1.050 jiwa. Jika dilihat secara persentase, kemiskinan mengalami penurunan dari 8,38 persen pada tahun 2013 menjadi 7,23 persen pada tahun 2018.

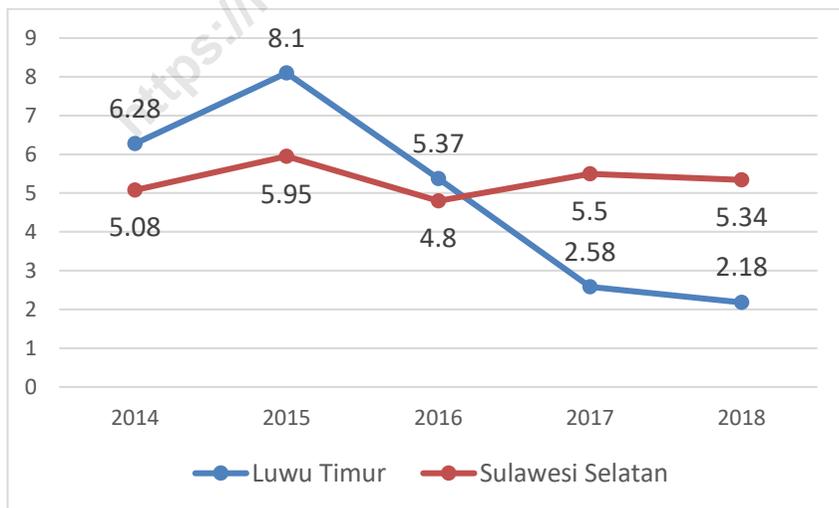
Tren tingkat kemiskinan pada kurun waktu 2013-2018 mengalami penurunan kecuali pada tahun 2016 dan 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, persentase penduduk miskin pada tahun 2018 berhasil turun kembali sebesar 0,43 poin atau penduduk miskin berkurang sebesar 790 jiwa.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2018 yang dibandingkan dengan tahun 2017 diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu Timur periode 2014 hingga 2016 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, selama dua tahun terakhir Kabupaten Luwu Timur berhasil menurunkan tingkat pengangguran

terbuka sehingga posisinya berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 5.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2013-2018



Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan (Persen), 2014-2018

LAMPIRAN

Lampiran 1. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Tahun)

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI SELATAN	69,60	69,80	69,82	69,84	70,08
Selayar	67,50	67,70	67,76	67,82	68,03
Bulukumba	66,43	66,73	66,84	66,96	67,27
Bantaeng	69,68	69,77	69,84	69,90	70,11
Jeneponto	65,39	65,49	65,57	65,65	65,89
Takalar	65,90	66,20	66,29	66,38	66,64
Gowa	69,78	69,88	69,92	69,95	70,11
Sinjai	66,36	66,46	66,54	66,61	66,83
Maros	68,50	68,55	68,58	68,60	68,74
Pangkajene Kepulauan	65,37	65,67	65,77	65,86	66,12
Barru	67,73	68,03	68,16	68,30	68,60
Bone	65,81	66,01	66,12	66,22	66,50
Soppeng	68,42	68,52	68,62	68,72	69,02
Wajo	65,93	66,23	66,38	66,52	66,79
Sidenreng Rappang	68,07	68,57	68,69	68,82	69,15
Pinrang	68,03	68,43	68,55	68,68	68,98
Enrekang	70,21	70,31	70,34	70,38	70,55
Luwu	69,14	69,44	69,52	69,60	69,84
Tana Toraja	72,11	72,41	72,48	72,56	72,80
Luwu Utara	67,00	67,40	67,50	67,61	67,90
Luwu Timur	69,44	69,64	69,71	69,79	70,03
Toraja Utara	72,50	72,80	72,87	72,94	73,09
Kota Makassar	71,38	71,47	71,49	71,51	71,70
Kota Pare Pare	70,39	70,59	70,64	70,69	70,88
Kota Palopo	70,12	70,20	70,25	70,30	70,49

Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Tahun)

Prov/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI SELATAN	12,90	12,99	13,16	13,28	13,34
Selayar	11,98	12,29	12,44	12,45	12,46
Bulukumba	12,31	12,32	12,64	12,65	12,79
Bantaeng	11,48	11,67	11,88	11,99	12,01
Jeneponto	11,68	11,70	11,77	11,93	11,95
Takalar	11,31	11,61	12,00	12,21	12,22
Gowa	12,45	12,74	13,03	13,04	13,29
Sinjai	11,96	12,34	12,83	12,84	12,85
Maros	12,37	12,67	12,96	12,97	12,99
Pangkajene Kepulauan	12,37	12,38	12,39	12,40	12,41
Barru	13,45	13,53	13,54	13,55	13,56
Bone	12,16	12,41	12,42	12,43	12,67
Soppeng	11,45	11,81	12,20	12,33	12,57
Wajo	13,05	13,07	13,08	13,09	13,11
Sidenreng Rappang	12,80	12,88	12,89	12,90	12,91
Pinrang	13,16	13,17	13,18	13,19	13,20
Enrekang	13,29	13,30	13,65	13,66	13,68
Luwu	12,87	12,88	13,27	13,28	13,30
Tana Toraja	12,89	13,23	13,24	13,25	13,50
Luwu Utara	12,09	12,11	12,33	12,38	12,39
Luwu Timur	11,95	12,36	12,78	12,79	12,81
Toraja Utara	12,61	12,95	13,33	13,34	13,35
Kota Makassar	14,75	14,76	14,80	15,18	15,55
Kota Pare Pare	14,04	14,44	14,45	14,46	14,47
Kota Palopo	15,01	15,02	15,03	15,05	15,06

Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Tahun)

Prov/Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI SELATAN	7,49	7,64	7,75	7,95	8,02
Selayar	7,10	7,16	7,17	7,18	7,40
Bulukumba	6,66	6,68	6,86	7,16	7,34
Bantaeng	6,16	6,16	6,17	6,45	6,47
Jeneponto	5,63	5,64	5,65	5,98	6,21
Takalar	6,57	6,57	6,64	6,77	6,91
Gowa	6,99	7,24	7,52	7,74	7,75
Sinjai	7,03	7,05	7,06	7,28	7,29
Maros	7,17	7,19	7,20	7,42	7,43
Pangkajene Kepulauan	7,31	7,32	7,33	7,48	7,49
Barru	7,28	7,60	7,61	7,85	7,86
Bone	6,11	6,55	6,76	6,77	6,97
Soppeng	7,04	7,05	7,06	7,42	7,63
Wajo	6,36	6,37	6,38	6,78	6,79
Sidenreng Rappang	7,30	7,32	7,33	7,52	7,79
Pinrang	7,45	7,47	7,48	7,54	7,84
Enrekang	7,98	8,05	8,06	8,43	8,68
Luwu	7,60	7,74	7,75	7,89	7,97
Tana Toraja	7,81	7,91	7,92	7,93	7,94
Luwu Utara	7,19	7,38	7,39	7,52	7,53
Luwu Timur	7,80	7,87	7,88	8,20	8,45
Toraja Utara	7,70	7,71	7,72	7,73	7,76
Kota Makassar	10,64	10,77	11,07	11,08	11,09
Kota Pare Pare	9,95	10,01	10,02	10,09	10,29
Kota Palopo	9,96	10,25	10,26	10,33	10,51

Lampiran 4. Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018 (Ribu Rupiah)

Prov/Kab/Kota	Paritas Daya Beli (PPP)				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI SELATAN	9.723	9.992	10.281	10.489	10.814
Selayar	7.656	7.793	8.123	8.436	8.666
Bulukumba	9.618	9.777	10.040	10.217	10.331
Bantaeng	10.294	10.467	10.596	10.751	11.153
Jeneponto	8.417	8.489	8.559	8.747	8.957
Takalar	9.351	9.423	9.759	9.845	10.134
Gowa	8.515	8.578	8.717	9.009	9.179
Sinjai	8.272	8.433	8.706	8.816	9.098
Maros	9.355	9.468	9.758	10.121	10.558
Pangkajene Kepulauan	10.161	10.517	10.670	10.837	11.197
Barru	9.733	9.811	10.155	10.285	10.622
Bone	7.845	7.930	8.275	8.470	8.686
Soppeng	8.699	8.835	8.965	9.035	9.291
Wajo	10.778	11.047	11.681	11.770	12.057
Sidenreng Rappang	10.434	11.004	11.368	11.523	11.834
Pinrang	10.680	10.791	10.899	11.279	11.508
Enrekang	9.347	9.818	10.188	10.359	10.683
Luwu	8.764	9.160	9.301	9.381	9.705
Tana Toraja	6.214	6.273	6.509	6.801	7.087
Luwu Utara	10.605	10.697	10.786	11.101	11.429
Luwu Timur	11.859	11.926	11.960	12.030	12.346
Toraja Utara	6.955	7.033	7.228	7.457	7.783
Kota Makasar	15.079	15.669	16.013	16.367	16.597
Kota Pare Pare	12.692	12.817	12.966	13.078	13.303
Kota Palopo	11.713	12.005	12.156	12.319	12.662

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018

Prov/Kab/Kota	Indek Pembangunan Manusia (IPM)				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI SELATAN	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90
Selayar	63,66	64,32	64,95	65,39	66,04
Bulukumba	65,24	65,58	66,46	67,08	67,70
Bantaeng	65,77	66,20	66,59	67,27	67,76
Jeneponto	61,45	61,61	61,81	62,67	63,33
Takalar	63,53	64,07	64,96	65,48	66,07
Gowa	66,12	66,87	67,70	68,33	68,87
Sinjai	63,83	64,48	65,36	65,80	66,24
Maros	66,65	67,13	67,76	68,42	68,94
Pangkajene Kepulauan	66,16	66,65	66,86	67,25	67,71
Barru	67,94	68,64	69,07	69,56	70,05
Bone	62,09	63,11	63,86	64,16	65,04
Soppeng	64,74	65,33	65,95	66,67	67,60
Wajo	66,49	66,90	67,52	68,18	68,57
Sidenreng Rappang	68,14	69,00	69,39	69,84	70,60
Pinrang	68,92	69,24	69,42	69,90	70,62
Enrekang	69,37	70,03	70,79	71,44	72,15
Luwu	67,34	68,11	68,71	69,02	69,60
Tana Toraja	65,08	65,75	66,25	66,82	67,66
Luwu Utara	66,90	67,44	67,81	68,35	68,79
Luwu Timur	69,75	70,43	70,95	71,46	72,16
Toraja Utara	66,15	66,76	67,49	67,90	68,49
Kota Makassar	79,35	79,94	80,53	81,13	81,73
Kota Pare Pare	75,66	76,31	76,48	76,68	77,19
Kota Palopo	75,65	76,27	76,45	76,71	77,30

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018

IPM 72,16

Tahun 2018



Peringkat 4
se-Sulawesi Selatan

Pengeluaran Per Kapita
Per Tahun yang Disesuaikan
Rp12.346.000



Angka Harapan Hidup
saat lahir

70,03 tahun

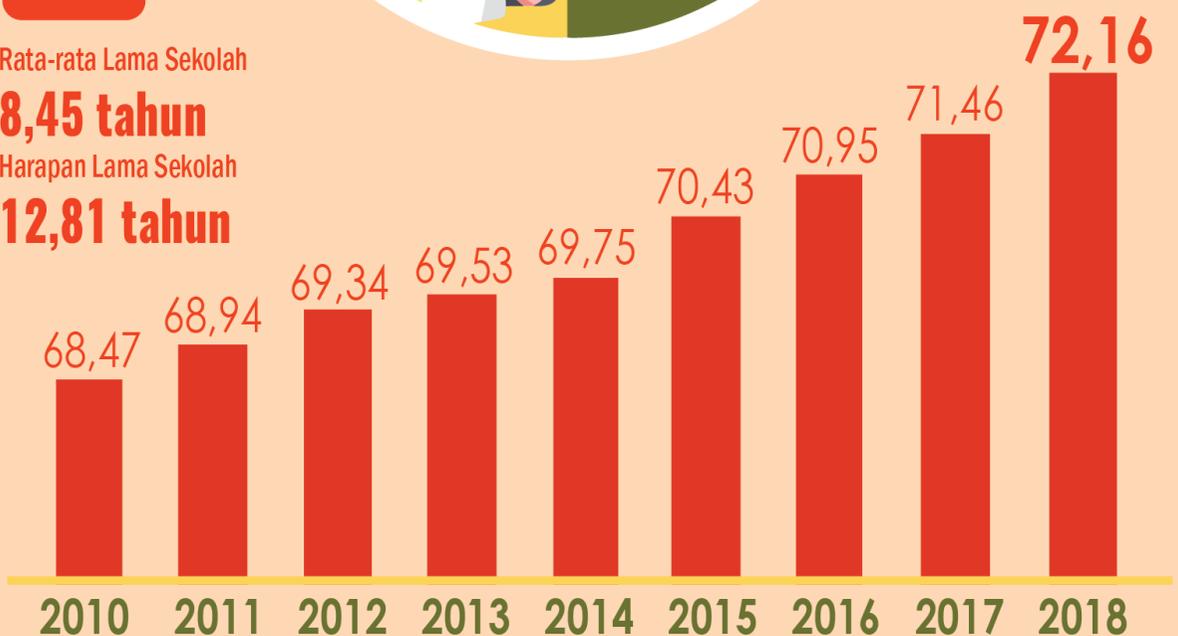


Rata-rata Lama Sekolah

8,45 tahun

Harapan Lama Sekolah

12,81 tahun



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno-Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telp: (0474) 3220038 E-mail: bps7325@bps.go.id